



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 29/MPP/Kep/1/1997**

**TENTANG**

**KETENTUAN DAN TATACARA PERMOHONAN FASILITAS  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERJANJIAN  
"BASIC AGREEMENT ON THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION"**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, industri dan investasi untuk menghadapi perdagangan bebas dikawasan ASEAN, maka pada tanggal 27 April 1996, Pemerintah Republik Indonesia dan para Menteri Ekonomi di ASEAN telah menandatangani Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme yang selanjutnya disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1996;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Basic Agreement tersebut perlu ditetapkan prosedur pelaksanaannya;
  - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);

9

2. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Dua Puluh Lima Kali diubah, terakhir dengan Keputusan RI Nomor 61 Tahun 1995;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 51 Tahun 1996 tentang Pengesahan Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 30/MPP/Kep/6/1996 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Ijin Usaha Industri dan Ijin Usaha Kawasan Industri di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan hasil Sidang Tingkat Menteri Ekonomi ke 28, tanggal 12 September 1996, tentang pelaksanaan Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation oleh negara-negara di ASEAN akan dimulai bulan Nopember 1996;
  2. Surat Menteri Koordinasi Bidang Produksi dan Distribusi Nomor 410/MK.PRODIS/9/1996 tentang Pelaksanaan Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERJANJIAN "BASIC AGREEMENT ON THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME".**

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. "Skema AICO" (= AICO Scheme) adalah Skema Kerjasama Industri dilingkungan ASEAN sebagaimana yang dimaksud dalam Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme (AICO) yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden R.I. No. 51 Tahun 1996;
2. "Kerjasama AICO" (=AICO Agreement) adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua Negara Peserta anggota ASEAN dengan masing-masing satu atau lebih Perusahaan Peserta di Negara Peserta;
3. "Negara Peserta" (=Participating Countries) adalah negara anggota ASEAN yang setuju berpartisipasi dalam kerjasama AICO dengan memberikan hak istimewa kepada Perusahaan Peserta;
4. "Perusahaan Peserta" (= Participating Companies) adalah perusahaan Industri yang didirikan dan beroperasi di negara anggota ASEAN yang memenuhi ketentuan Article 2 (1) dan Article 3 dari Basic Agreement;

5. Certificate of Eligibility yang selanjutnya disebut COE adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Sekretariat ASEAN untuk mendapatkan fasilitas tarif dalam rangka kerjasama AICO;
6. "Produk AICO" (= AICO Products) adalah produk yang tercantum dalam COE yang diberikan kepada Perusahaan Peserta .

Produk tersebut dapat berupa :

- a. "Produk akhir AICO" adalah produk yang merupakan hasil akhir yang tidak memerlukan proses lebih lanjut;
  - b. "Produk setengah jadi AICO" adalah produk yang digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk akhir AICO;
  - c. "Bahan baku AICO" adalah bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk setengah jadi dan atau produk akhir AICO.
7. "Tingkat Tarif Preferensi" adalah tingkat tarif yang diberikan terhadap pengimporan Produk AICO yang besarnya berkisar antara 0 - 5%.
  8. "Direktur Jenderal Pembina Industri" adalah Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/-1996, dan Direktur Jenderal Pembina Industri Departemen Teknis lainnya yang mendapatkan pelimpahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986.

9. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
10. "Formulir Permohonan AICO" adalah suatu daftar isian sesuai ketentuan yang telah ditetapkan bersama oleh negara-negara ASEAN dan Formulir permohonan dapat dibuat sendiri oleh calon Perusahaan Peserta dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

## Pasal 2

- (1) Fasilitas dalam rangka Kerjasama AICO dapat diberikan kepada Perusahaan Peserta di Indonesia yang memenuhi semua syarat berikut :
  - a. Perusahaan Peserta berbentuk Badan Hukum;
  - b. Didirikan dan melakukan kegiatannya di Indonesia;
  - c. Sekurang-kurangnya 30% dari saham-sahamnya dimiliki oleh :
    - i) satu atau lebih warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
    - (ii) satu atau lebih badan hukum Indonesia yang gabungan kepemilikan modalnya oleh warga negara Indonesia sekurang-kurangnya 30%.
  - d. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c harus disampaikan dalam bentuk dokumen resmi.

- (2) Dapat menyimpang lebih rendah dari 30% sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (1) huruf c Pasal ini, apabila Perusahaan Peserta di Indonesia memenuhi satu atau lebih ketentuan berikut :
- a) Perusahaan Peserta melakukan kegiatannya di Kawasan Timur Indonesia;
  - b) Secara kumulatif, 40% kepemilikan Perusahaan Peserta dikuasai oleh perusahaan-perusahaan dalam lingkup ASEAN dan 15% dari kepemilikan tersebut harus dikuasai oleh perusahaan nasional;
  - c) Perusahaan Peserta menghasilkan komponen dan/atau barang modal;
  - d) 50% dari bahan untuk diproses dipasok dari hasil industri kecil dan menengah.
  - e) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d harus disampaikan dalam bentuk dokumen resmi.
- (3) Perusahaan Peserta dan perusahaan mitranya di negara ASEAN lain yang berpartisipasi harus saling memanfaatkan sumberdaya, komplementasi industri dan saling melengkapi atau melakukan kerjasama industri dibidang :alih teknologi, pelatihan, lisensi, pembelian terkonsolidasi, manajemen, penjualan dan pemasaran dan bentuk kerjasama lainnya.
- (4) Menyampaikan dokumen yang merupakan bukti-bukti sah untuk mendukung persyaratan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan ini.

### Pasal 3

- (1) Produk AICO mencakup semua produk diluar yang tercantum dalam General Exception pada Perjanjian Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Article 9,

dan harus memenuhi ketentuan Rules of Origin dari skema CEPT.

- (2) Persetujuan Produk AICO diberikan berdasarkan HS 8-digit atau lebih.

#### **Pasal 4**

- (1) Perusahaan Peserta AICO mengajukan surat permohonan mengikuti Skema AICO kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.
- (2) Perusahaan Peserta AICO dibawah pembinaan Departemen Teknis lainnya mengajukan surat permohonan mengikuti skema AICO kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Teknis yang bersangkutan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.
- (3) Perusahaan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengisi formulir permohonan AICO sebagaimana terlampir pada Keputusan ini dan disertai dengan penjelasan mengenai:
  - a. Latar belakang dan motivasi perusahaan berpartisipasi dalam skema AICO;
  - b. Penjelasan yang lebih spesifik tentang manfaat yang diperoleh perusahaan berpartisipasi dalam skema AICO;
  - c. Investasi yang diperlukan dalam melaksanakan skema AICO;

- d. Copy Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Ijin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri;
  - e. Copy pernyataan kondisi keuangan terakhir yang telah diaudit;
  - f. Dokumen atau bukti-bukti kemitraan untuk melakukan saling memanfaatkan sumberdaya, hubungan industri yang saling melengkapi atau kerjasama industri;
  - g. Surat kuasa sebagai pejabat yang berwenang atas nama perusahaan pemohon (apabila diajukan melalui kuasa);
  - h. Profil Perusahaan Peserta yang antara lain mencakup informasi tentang jenis produk, kapasitas, jumlah pegawai, dan lain-lain.
- (4) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak lengkapnya permohonan sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, Sekretaris Jenderal meneruskan permohonan tersebut kepada Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan atau Sekretaris Jenderal Departemen Teknis lainnya dengan tembusan kepada Sekretariat ASEAN.
- (5) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan atau Sekretaris Jenderal Departemen Teknis lainnya harus menyampaikan pendapatnya mengenai permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Sekretaris Jenderal;
- (6) Dirjen Pembina Industri yang bersangkutan atau Sekretaris Jenderal Departemen Teknis lainnya melakukan penghitungan besarnya tarif preferensi dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal;



- (7) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima pendapat dari Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan atau Sekretaris Jenderal Departemen Teknis lainnya, Sekretaris Jenderal menyampaikan pemberitahuan permohonan kepada Sekretariat ASEAN;
- (8) Atas dasar pemberitahuan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sekretariat ASEAN mengeluarkan COE dan disampaikan ke Sekretaris Jenderal;
- (9) Sekretaris Jenderal segera menyampaikan COE kepada Perusahaan Peserta dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pembina industri yang bersangkutan atau Sekretaris Jenderal Departemen Teknis lainnya dan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;
- (10) Perusahaan Peserta yang telah memperoleh COE dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan COE untuk mendapatkan Tarif Preferensi dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Fasilitas dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan atau Sekretaris Jenderal Departemen Teknis lainnya;
- (11) Besarnya Tarif Preferensi yang diberikan akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan usulan Sekretaris Jenderal.

#### **Pasal 5**

- (1) Perusahaan Peserta dibawah pembinaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang telah menerima fasilitas dalam rangka kerjasama AICO wajib memberi laporan perkembangan kegiatannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberian Fasilitas kepada Direktur

Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan dengan tembusan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

- (2) Perusahaan Peserta dibawah pembinaan Departemen Teknis lainnya yang telah menerima fasilitas dalam rangka kerjasama AICO wajib memberi laporan perkembangan kegiatannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberian Fasilitas kepada Direktur Jenderal Pembina Industri Departemen Teknis lainnya dengan tembusan Sekretaris Jenderal, Sekretaris Jenderal Departemen Teknis lainnya, Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

#### Pasal 6

- (1) Perusahaan Peserta yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberi peringatan tertulis;
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan atau Direktur Jenderal Pembina Industri Departemen Teknis lainnya sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, atas saran Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan atau Direktur Jenderal Pembina Industri Departemen Teknis lainnya, maka Sekretaris Jenderal mengusulkan kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk membekukan Tarif Preferensi dan mengembalikan bea masuk yang ditangguhkan;

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 29/MPP/Kep/1/1997

**Pasal 7**

Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini akan diatur oleh  
Sekretaris Jenderal.

**Pasal 8**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a  
Pada tanggal 30 Januari 1997

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



*T. Ariwibowo*  
**T. ARIWIBOWO**

SALINAN Keputusan ini

disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Ekku & Wasbang
2. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi
3. Menteri Luar Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Kehutanan
6. Menteri Kesehatan
7. Menteri Pertanian
8. Menteri Pertambangan dan Energi
9. Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,  
Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan  
dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
11. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen  
Perindustrian dan Perdagangan
12. Pertinggal

SK-AICO/wind/22

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 29/MPP/Kep/1/1997  
TANGGAL : 30 Januari 1997

---

C O N T O H  
S P E C I M E N  
A I C O A R R A N G E M E N T A P P L I C A T I O N F O R M  
F O R M U L I R P E R M O H O N A N A I C O

I. PERUSAHAAN PEMOHON  
PROPOSING COMPANIES

- A. Nama Perusahaan  
Name of Company :
- B. Negara  
Country :
- C. Alamat Kantor & Nomor  
Telepon/Faximili  
Official Address & :  
Phone and Fax. No.
- D. Nama Penghubung & Kuasa  
Contact Person & :  
Designation
- E. Tanggal Pengesahan Sebagai Badan Hukum  
Date of Incorporation :
- F. Kegiatan Usaha  
Business Activities :

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 29/MPP/Kep/1/1997  
Tanggal : 30 Januari 1997

G. Struktur Modal  
Capital Structure :

<u>Lokal</u>		<u>Anggota ASEAN</u>		<u>Diluar Anggota ASEAN</u>	
Local		Other ASEAN		Non-ASEAN	
<u>Amount</u>	%	<u>Amount</u>	%	<u>Amount</u>	%
Besarnya		Besarnya		Besarnya	

Authorized  
Subscribed  
Paid-up

H. Pertimbangan untuk dikecualikan dari keharusan bahwa 30%  
saham harus dimiliki nasional  
Justification of Waiver of 30% National Equity (Where Applicable)

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 29/MPP/Kep/1/1997  
Tanggal : 30 Januari 1997

I. Produk Yang Diajukan (Akhir/Setengah Jadi/Bahan Baku)  
NOMINATED PRODUCT (Final/Intermediate/Raw Material)

- 1.1. Uraian Barang  
Description of Goods :
- 1.2. Nomor Kode HS  
HS Code No. :
- 1.3. Kandungan ASEAN (%)  
ASEAN Content (%) :
- 1.4. Besar & Nilai per unit  
Volume & value per unit :

II. URAIAN MENGENAI PEMANFAATAN SUMBERDAYA,  
KOMPLEMENTASI INDUSTRI ATAU KEGIATAN-KEGIATAN  
KERJASAMA INDUSTRI

DESCRIPTION OF RESOURCE SHARING, INDUSTRIAL  
COMPLEMENTATION OR INDUSTRIAL COOPERATION  
ACTIVITIES.

III. DIAGRAM SKEMA PERJANJIAN AICO/ARUS PRODUK  
SCHEMATIC DIAGRAM OF THE AICO ARRANGEMENT/-  
PRODUCT FLOW.

IV. PENYELESAIAN  
JUSTIFICATION OF THE AICO ARRANGEMENT

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.



*[Handwritten signature]*  
T. ARIWIBOWO